

## **PENGARUH DIASPORA INDIA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDIA - MALAYSIA**

Oleh:

**ALISAN ANGELA**

(Alumni Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

### **Abstract**

*This study aims to: first, identify the influence of Indian diaspora towards the bilateral relationship between India and Malaysia, and secondly, to observe the effectiveness of Indian diaspora management to strengthen the India – Malaysia bilateral relations. To answer the research questions, the writer applied qualitative descriptive research method with data collection technique through literature review and interview. Qualitative analysis technique with deductive writing technique was used by the writer to analyze the data.*

*The result shows that Indian diaspora do have the influence towards India – Malaysia bilateral relations, even from the early independencies of Malaysia. The influence also had shown by the cooperation direnction between these two countries that always looks up to each other first. Indian diaspora also stand in a vulnerable position, which on one side, it could support the bilateral relations and on the other side, it could endanger the relations. The effectiveness of Indian diaspora management itself to strengthen the India – Malaysia relations still can be elevated and it took a bigger role from Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA) which aims to manage Indian diaspora and to make Indian diaspora as a strategic resource to India.*

**Keywords:** *India, Malaysia, diaspora, billateral relations*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, melihat pengaruh diaspora India di dalam hubungan bilateral antara Malaysia dan India, dan kedua, melihat efektifitas pengelolaan diaspora India dalam memperkuat hubungan bilateral India – Malaysia. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Adapun untuk menganalisa data, penulis memakai teknik analisis kualitatif dengan teknik penulisan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diaspora India memiliki penaruh terhadap hubungan bilateral India dan Malaysia bahkan sejak awal merdekanya negara Malaysia. Hal ini terlihat dari arah kerjasama masing – masing negara yang selalu saling mengutamakan satu sama lain. Selain itu, diaspora India berada dalam posisi yang rapuh, dimana di satu sisi dapat mendukung hubungan bilateral dan di sisi lain, dapat merusak hubungan bilateral antara India dan Malaysia. Efektifitas pengelolaan diaspora India sendiri dalam hubungan bilateral India dan Malaysia masih dapat ditingkatkan lagi dan hal ini memerlukan peranan yang lebih dari *Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA)*

yang bertujuan untuk mengatur diaspora India serta menjadikan diaspora India sebagai salah satu sumber daya yang strategis bagi India.

**Kata kunci:** India, Malaysia, diaspora, hubungan bilateral

## PENDAHULUAN

Di era global ini, sebaran imigran dilakukan oleh berbagai bangsa dengan tujuan ke berbagai bangsa dan negara di dunia. Sebaran mereka seperti sedang membangun basis global untuk sebuah evolusi jaringan diasporik. Diaspora terbanyak di dunia adalah diaspora China, sementara di tempat kedua adalah diaspora India. Sesuai dengan *Constitution of India or the Citizenship Act, 1955*, India membagi diasporanya ke dalam 2 kelompok, yaitu;

- a. *Non-Resident Indian* (NRI), yaitu penduduk India yang menetap di luar negeri karena urusan pekerjaan, penugasan di luar India atau menetap di luar negeri di bawah suatu keadaan tertentu.
- b. *Person of Indian Origin* (PIO), bukan merupakan penduduk Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, China, Iran, Nepal atau Bhutan, yang pernah memiliki paspor India. PIO juga adalah orang yang memiliki ayah atau kakek warga negara India sesuai dengan *Constitution of India or the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955)*.<sup>1</sup>

Para PIO inilah yang kemudian diberikan kebijakan dari pemerintah India yaitu *Overseas Citizenship of India* (OCI), selama negara asalnya mengizinkan *dual citizenship* atau kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan OCI ini tidak sama dengan warga negara India reguler, dimana OCI tidak mendapatkan beberapa fasilitas seperti: paspor India, hak pilih dalam pemilihan umum India, tidak dapat mencalonkan diri sebagai pejabat negara, dan tidak dapat bekerja di institusi pemerintah. Keuntungan menjadi OCI antara lain; memudahkan pengurusan visa ke India dan pembebasan dari pelaporan ke pihak polisi selama berada di India.

Gelombang migrasi diaspora India dapat dibagi menjadi 3 bagian merujuk pada waktu migrasinya, yaitu; *the Old Diaspora*, *the New Diaspora*, dan *the Gulf Diaspora*.<sup>2</sup> *The Old Diaspora* dimulai sekitar tahun 1900 menjadi cikal bakal diaspora India yang diberangkatkan ke Malaysia (pada saat itu disebut Malaya) oleh pemerintahan Inggris untuk bekerja di perkebunan karet. Pada kerangka waktu ini pula, pedagang – pedagang India mulai berlayar dan cukup banyak yang kemudian berdiam di Malaysia. Gelombang kedua dan ketiga migrasi ini yang terdiri dari tenaga kerja ahli kebanyakan tidak lagi memilih Malaysia

---

<sup>1</sup>*Overview of Citizenship Act, 1955 and Amendments Made There Under*  
[http://indembassyuae.org/ConsulServ\\_indCiti.html](http://indembassyuae.org/ConsulServ_indCiti.html) diakses pada tanggal 15 Oktober 2014

<sup>2</sup>*Ibid*

sebagai tujuan utama dan memilih negara barat dan timur tengah sebagai tujuannya.

Hingga akhir tahun 1939, sekitar 700,000 diaspora India menetap di Malaya. Selain bekerja di perkebunan karet dan kelapa sawit, sebagian kecil diaspora India di Malaya juga ada pada beberapa bidang pekerjaan, sekitar 4% dari jumlah di atas bekerja di bidang perdagangan, bisnis dan profesional.<sup>3</sup> Para diaspora India dari kelas pekerja sendiri diisolasi secara politik dan sosial dengan ketat. Oleh karena itu pada tahun 1936 dibentuklah sebuah organisasi politik pertama India yang efektif yaitu *Central Indian Association of Malaya* (CIAM) yang keanggotaannya berlaku untuk seluruh diaspora India di Malaya tanpa memandang etnis tertentu. Hanya saja kepemimpinan organisasi ini hanya dapat dipegang oleh kaum India menengah ke atas atau yang berpendidikan Inggris.<sup>4</sup>

Dengan berkembangnya waktu, diaspora India tidak lagi berada di pekerjaan tingkat rendah dan dengan terbentuknya *Malaysian Indian Congress* (MIC) pada tahun 1946, diaspora India mulai memasuki ranah pemerintahan Malaysia. Tujuan awal didirikannya MIC adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan India dari kolonial Inggris. Setelah India mendapatkan kemerdekaannya, MIC bergabung dalam perjuangan Malaya untuk meraih kemerdekaan Malaysia. MIC memposisikan diri sebagai perwakilan dari komunitas India di Malaysia. MIC kemudian bergabung dengan Aliansi Nasional bersama dengan *United Malays National Organization* (UMNO) dan *Malaysian Chinese Association* (MCA) pada tahun 1954 dan pada tahun 1973 Aliansi Nasional berubah nama menjadi Barisan Nasional dengan penambahan beberapa anggota partai.<sup>5</sup> Meskipun menjadi bagian dari koalisi Barisan Nasional, ketiga partai besar ini tetap merupakan partai yang berbasis etnis yang mana membuktikan bahwa politik rasial masih tetap ada di Malaysia.

Barisan Nasional kemudian merupakan satu – satunya koalisi yang memiliki waktu terlama yang memerintah di Malaysia bahkan satu – satunya di antara negara – negara yang menganut sistem demokrasi. Sejak tahun 1974, pemilihan umum pertama di Malaysia, Barisan Nasional selalu meraih suara terbanyak hingga pada tahun 2008, meski tidak mengalami kekalahan namun terjadi penurunan jumlah suara yang sangat drastis yang disebut sebagai fenomena “*political volcano*”.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Arasaratnam, S. 1970. *Indians in Malaya and Singapore*. London: Oxford University Press

<sup>4</sup> Parmer, N.J. 1960. *Colonial Labor Policy and Administration: A History of Labor in the Rubber Plantation Industry in Malaya 1910–1941*. New York: J.J. Augustin Inc.

<sup>5</sup> Malaysian Indian Congress – History. <http://www.mic.org.my/history> diakses pada tanggal 5 November 2014

<sup>6</sup> Lim, Kim Hui. 2008. “Political Volcano” in 12<sup>th</sup> Malaysian General Election: *Makkal Sakhti* (People Power) Against Communal Politics, “3Cs” and Marginalization of Malaysian Indian. *Journal of Politics and Law* Vol. 1 No. 3 (2008): hlm. 87

Salah satu penyebab penurunan jumlah suara ini disebabkan oleh banyaknya suara dari etnis India yang berkurang. Hal ini sebagai akibat dari munculnya isu mengenai diskriminasi etnis pada pekerjaan, pendidikan, hingga kebebasan beragama. Isu diskriminasi etnis sendiri bukan merupakan isu baru di Malaysia. Pertentangan antara etnis India dan Bumiputera (penduduk pribumi Malaysia) telah berlangsung sejak tahun 1971 dengan adanya *New Economic Policy* yang berbasis-rasis dan hanya menguntungkan Bumiputera.

Terlepas dari permasalahan tersebut, diaspora India juga selalu terwakilkan di tatanan kabinet kementerian Malaysia. Pada periode sekarang ini di bawah Perdana Menteri Mohd Najib bin Abdul Razak, terdapat 2 menteri dan 2 deputi menteri yang merupakan diaspora India dan tentu saja merupakan anggota partai MIC. Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak sepanjang berkuasanya Barisan Nasional di pemerintahan Malaysia.

India juga merupakan salah satu negara yang sejak dini telah memperhatikan diaspora sebagai aset negaranya. Pada tahun 2000, *Ministry of Overseas Indian Affairs* (MOIA) dibentuk untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan diaspora India.<sup>7</sup> MOIA memiliki 6 tujuan utama yang harus tercapai, dimana salah satunya adalah menjadikan diaspora India sebagai sumber daya yang strategis. MOIA dengan cermat mengamati bahwa sekarang ini terdapat banyak diaspora India yang memegang jabatan penting yang dapat mempengaruhi perpolitikan dan perekonomian negara *host*-nya. Salah satu contoh awalnya adalah bagaimana peranan komunitas India-Amerika dalam perundingan nuklir sipil India-Amerika Serikat. Apabila dikelola dengan baik, maka diaspora India yang memiliki pengaruh tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi India.<sup>8</sup>

Melihat seluruh fakta mengenai diaspora India di Malaysia, terutama di dalam pemerintahan Malaysia, penulis merasa penting untuk mengukur seberapa besar pengaruh diaspora di suatu negara. Selain itu, India sebagai salah satu *rising power from Asia* menjadi sorotan dunia beberapa tahun terakhir karena pesatnya pertumbuhan ekonominya. Dengan jumlah diaspora yang besar, hal ini tentu saja dapat menjadi salah satu faktor bagaimana diaspora dapat berperan besar dalam membangun negara asalnya.

---

<sup>7</sup> Ministry of Overseas Indian Affairs. *About Us - An Overview*. <http://moia.gov.in/services.aspx?mainid=6> diakses pada tanggal 15 Oktober 2014

<sup>8</sup>Ministry of Overseas Indian Affairs. *Strategic Plan*

## TINJAUAN PUSTAKA

### Diaspora

Konsep Diaspora adalah suatu konsep yang fokus pada hubungan antara para migran di negara tujuan dan budaya negara asalnya.<sup>9</sup> Para kelompok nasionalis atau pemerintahan sering menggunakan konsep diaspora untuk mengejar agenda atau tujuan pembentukan negara bangsa atau untuk mengatur populasi rakyat yang berada di luar negeri. Diaspora sendiri adalah sebuah konsep lama yang kegunaan dan artinya berganti beberapa waktu terakhir. Konsep diaspora ini awalnya merujuk hanya pada pengalaman historis dari kelompok tertentu, secara spesifik yaitu Yahudi dan Armenia. Kemudian, diperluas menjadi kaum minoritas di Eropa. Di akhir tahun 1970, kata 'diaspora' mengalami perubahan yang beragam pada penggunaan dan interpretasinya.<sup>10</sup>

Gagasan tentang "diaspora" modern adalah gagasan yang mencoba melingkup kerangka global baru ini. Diaspora atau komunitas diaspora hari ini lebih digunakan sebagai istilah yang merujuk pada berbagai kelompok yang keberadaannya diluar wilayah asli mereka, seperti ekspatriat, pengungsi, tamu, imigran, minoritas etnis dan ras, bahkan orang buangan/asingan dan lainnya<sup>11</sup>, dan menyatukan pengertian kesemuanya menjadi satu entitas dan memiliki harga sentimental kebanggaan sebagai patriot rantau bangsa mereka. Diaspora juga mencakup bentuk-bentuk perkembangan sosial dan budaya dari bentuk persebaran manusia tersebut.

### Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam hubungan internasional memiliki makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Konsep hubungan bilateral ini digunakan untuk memperkuat kerjasama antara dua negara dengan menggunakan pengaruhnya sehingga dapat mencapai tujuan nasionalnya. Konsep hubungan bilateral antara 2 negara biasanya merujuk pada ikatan politik, ekonomi, budaya dan sejarah. Hubungan bilateral yang kuat sering dikarakteristikan dengan kerja sama antara institusi dan perorangan di tingkat administratif dan politik, begitu pula dalam sektor privat, pendidikan dan lingkup sipil. Elemen lainnya dari hubungan bilateral meliputi perdagangan dan investasi, pertukaran budaya, juga pengetahuan umum, kesadaran publik antar negara.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Kenny. 2013.*Diaspora: A Very Short Introduction*. Oxford University Press

<sup>10</sup> Faist, Thomas. 2010. *Diaspora and Transnationalism: What kind of dance partners?*. Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories, and Methods, Amsterdam University Press

<sup>11</sup> Safran, William. *Diasporas in modern societies: myths of homeland and return*. Diaspora Journal.1(1) . hlm.83

<sup>12</sup> EEA and Norway Grants 2009 – 2014. *Guideline for Strengthened Bilateral Relations*

Penggambaran tentang hubungan bilateral tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara untuk mengadakan hubungan dan menjalin kerjasama antara kedua negara dan tidak tergantung hanya pada negara yang dekat saja melainkan juga negara yang secara geografis letaknya agak jauh. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua negara.

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional.<sup>13</sup>

### **Konsep Transnasionalisme**

Konsep diaspora sendiri dalam beberapa konteks dapat disandingkan dengan konsep transnasionalisme. Keadaan tersebut adalah apabila diaspora di suatu negara melakukan aktifitas - aktifitas yang memberikan pengaruh bagi negara lain, entah itu negara asalnya ataupun negara lain. Migran atau komunitas diaspora sendiri baru dapat dikatakan aktor transnasionalisme apabila aktifitas yang dilakukan dilakukan secara terus - menerus dan tetap memberi pengaruh bagi negara lain. Konsep transnasionalisme merupakan sebuah konsep yang berguna dalam menjelaskan fenomena kontemporer yang berkaitan dengan migrasi masal dan proses - proses perubahan politik dan budaya melintasi batas nasional.<sup>14</sup>

Keberadaan konsep transnasionalisme sendiri tidak lepas dari kemajuan teknologi yang mampu menghubungkan jaringan jarak jauh dengan kecepatan dan efisiensi yang meningkat secara terus - menerus, antara lain internet, *instant messaging*, *e-mail*, hingga penerbangan berbiaya rendah. Segala kemudahan ini jelas saja mempermudah para diaspora untuk membina ikatan yang kuat dan awet ke daerah atau negara asalnya dan dalam waktu yang sama juga tetap berikatan dengan negara tempat mereka menetap. Demikian halnya dengan

---

<sup>13</sup>T. May, Rudy. 2002. *Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, hlm.27

<sup>14</sup>Garret Maher. 2012. *Defining Transnationalism: Geographical Perspective*. Presentation. Department of Geography, National University of Ireland, Galway.

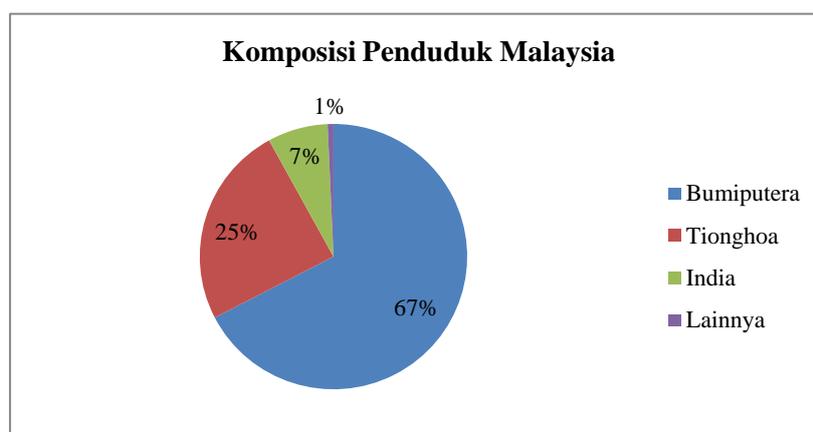
globalisasi, dimana fenomena tersebut mempermudah segala aktifitas lintas batas dari para diaspora. Namun dengan kemudahan tersebut para diaspora tetap semakin kuat menjaga budayanya bukannya membiarkan budaya asalnya memudar dan semakin bercampur baur dengan budaya lain.

## PEMBAHASAN

Sebagai salah satu negara dengan jumlah diaspora India terbesar di dunia, Malaysia tentu saja memiliki banyak diaspora India yang berpengaruh, baik itu di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan. Hal ini tidak lepas dari lamanya diaspora India telah ada di Malaysia dan sejarah diaspora India di Malaysia yang cukup berpengaruh dalam proses meraih kemerdekaan Malaysia dari Inggris. Diaspora India di Malaysia sendiri telah mengisi bagian di berbagai sektor Malaysia, baik itu ekonomi dan politik. Pernikahan campur antara etnis India dan Melayu juga banyak terjadi meskipun hal ini mengakibatkan dihapusnya identitas India dari diaspora India tersebut.

Persentase penduduk Malaysia berdasarkan kelompok etnisnya hingga akhir tahun 2014 terdiri dari 67,3% kaum *Bumiputera* yaitu suku Melayu dan suku asli (Orang Asli, Sabah dan Sarawak). Suku Melayu didefinisikan oleh konstitusi adalah penduduk beragama Islam dan menggunakan bahasa Melayu. Kaum *Bumiputera* mendominasi dunia perpolitikan nasional, administratif dan pekerjaan pemerintahan lainnya. Kaum Tionghoa yang berjumlah 25% dari jumlah penduduk Malaysia sebagai besar memainkan peran yang penting di bidang perdagangan dan bisnis. Keturunan India di Malaysia sendiri berjumlah 7% dari seluruh penduduk di Malaysia, yaitu sekitar dua juta jiwa yang mana merupakan jumlah diaspora India terbesar di suatu negara<sup>15</sup>.

**Bagan 3.2** Komposisi Penduduk Malaysia Berdasarkan Kelompok Etnis



Sumber: *Malaysia Statistical Releases Social and Demography 2014*

<sup>15</sup>Karmveer Singh. Challenges to the Rights of Malaysians of Indian Descent. <http://www.e-ir.info/2013/02/06/challenges-to-the-rights-of-malaysians-of-indian-descent/>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2015

Di bawah kolonialisasi Inggris pada tahun 1920, terbentuklah masyarakat multi etnis disebabkan oleh jumlah migran yang besar terkumpul di Malaya. Meskipun seluruh masyarakat hidup berdampingan di bawah satu pemerintahan, interaksi antar etnis hanya sebatas transaksi ekonomi saja. Dengan kehidupan seperti itu, beberapa migran yang sebenarnya hanya datang bekerja selama 3 – 5 tahun memilih untuk tinggal lebih lama dan berdomisili secara permanen di Malaya. Para migran dari India dan Tiongkok kemudian membentuk institusi dan hirarki dalam bidang sosial dan budaya serta tetap mempertahankan bahasa dan budaya asalnya.<sup>16</sup>

Kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957 membuat keterbatasan antar etnis yang direkayasa oleh Inggris mulai menghilang. Kaum *bumiputera* diberikan hak – hak dalam menjalankan pemerintahan dan etnis India dan Tiongkok diberikan hak kewarganegaraan dan kebebasan untuk mengejar keuntungan ekonomi mereka. Pemberian hak ini mengingat kedua etnis membantu Malaysia dalam mendapatkan kemerdekaannya dengan membentuk aliansi politik yang terdiri dari partai – partai yang berdasarkan etnis. Namun kebebasan tidak berlangsung lama dikarenakan angka kemiskinan yang meningkat dan tingginya kesenjangan ekonomi dalam kelompok etnis *bumiputera* pada masa itu sehingga timbul kecemburuan terhadap etnis India dan Tiongkok yang telah lebih mandiri untuk mengusahakan perekonomiannya.

Kesenjangan dan ketidaksetaraan yang terjadi di dalam distribusi pemasukan antara etnis di Malaysia ini kemudian memuncak menjadi sebuah kerusuhan antar etnis pada tanggal 13 Mei 1969. Menurut Jomo<sup>17</sup>, terdapat tiga pembangunan yang berkaitan dengan memuncaknya kerusuhan tersebut; (1) meningkatnya kekecewaan publik Malaysia terhadap kebijakan pemerintahan, khususnya dalam bidang ekonomi dan budaya; (2) penolakan yang dilakukan oleh kaum *bumiputera* kelas menengah terhadap kebijakan dari Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Razak, yang mengakomodasi etnis Tiongkok dan para pemilik modal asing; dan (3) penolakan pemilihan terhadap koalisi Aliansi dalam mendukung adanya oposisi yang terbagi secara etnis. Meskipun begitu, penjelesan resmi dari pemerintah Malaysia terhadap timbulnya kerusuhan tersebut adalah sebagai reaksi dari ketidaksetaraan yang terjadi antar komunitas etnis yang berbeda.<sup>18</sup>

Selain itu, diaspora India yang sejak lama telah berada dalam dunia perpolitikan dan pemerintahan Malaysia juga semakin bertambah kuantitasnya.

---

<sup>16</sup>John H. Drabble. *Economic History of Malaysia*. <http://eh.net/encyclopedia/economic-history-of-malaysia/> diakses pada tanggal 9 Maret 2015

<sup>17</sup>Jomo, K. S. 1990. Whither Malaysia's new economic policy?. *Pacific Affairs*. hlm. 471. <http://www.jstor.org/stable/2759912> diakses pada tanggal 13 Maret 2015

<sup>18</sup>Malaysia. *Third Malaysia Plan 1976-1980*

Partai politik yang mengakomodasi etnis India semakin bertambah jumlahnya dan juga jumlah diaspora India yang menduduki kursi menteri juga semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini dianggap mampu meningkatkan saluran suara bagi diaspora India yang berada di Malaysia.

Namun, tidak sedikit pula penolakan yang terjadi terhadap peningkatan ini dikarenakan beberapa jabatan menteri yang dipegang oleh diaspora India merupakan jabatan yang cukup penting. Salah satu perwakilan dari partai *United Malays National Organization* (UMNO) menyampaikan bahwa jabatan menteri sumber daya manusia harus tetap dipegang oleh etnis Melayu, bukannya etnis India<sup>19</sup>. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan meningkatkan jumlah etnis India sebagai pegawai negeri sipil yang diajukan oleh menteri sumber daya manusia yang beretnis India<sup>20</sup>.

Hingga pertengahan tahun 1970, pemerintah India belum melihat adanya keuntungan dari diaspora India. Pada tahun 1980, Perdana Menteri India pada saat itu kemudian mengundang beberapa diaspora India untuk datang kembali ke India untuk membantu pembangunan India pada beberapa sektor inti yang mencakup sektor telekomunikasi<sup>21</sup>. Di tahun 1990, dengan ditetapkannya sistem ekonomi liberal, diaspora India diberikan dorongan untuk lebih aktif lagi dalam pembangunan India.

Pembentukan komunitas diaspora India sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya inisiatif dari pemerintah India untuk mengumpulkan para diaspora ini. Di tahun 1989, para diaspora India di Amerika Serikat berinisiatif untuk mengadakan *First Global Convention of People of Indian Origin* di New York. Pemicu utama dibentuknya konvensi ini adalah banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami diaspora India di dunia dimana yang terbesar adalah pada tahun 1987 terjadi kudeta militer terhadap pemerintah Fiji yang didominasi oleh diaspora India. Konvensi ini kemudian menghasilkan pembentukan organisasi global diaspora India yang pertama, yaitu *Global Organization of People of Indian Origin* (GOPIO). GOPIO kemudian mengajukan petisi pada PBB mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia<sup>22</sup>.

Pada tahun 2000, dibentuk suatu tim khusus oleh pemerintah India yaitu *High Level Indian Diaspora Committee* untuk menelaah lebih lanjut persoalan diaspora India di dunia. Setelah melakukan kunjungan ke beberapa negara di berbagai benua, tim khusus ini kemudian mengajukan sebuah laporan dengan

---

<sup>19</sup>UMNO Youth: Human Resources Minister should always be Malay.<http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/umno-youth-human-resources-minister-should-always-be-malay#sthash.vkUhoHot.dpuf> diakses pada tanggal 27 Juni 2015

<sup>20</sup>Malaysia to recruit more Indian-origin civil servants.  
[http://articles.economictimes.indiatimes.com/2009-02-14/news/28394259\\_1\\_civil-servants-civil-service-malaysian-indian-congress](http://articles.economictimes.indiatimes.com/2009-02-14/news/28394259_1_civil-servants-civil-service-malaysian-indian-congress) diakses pada tanggal 27 Juni 2015

<sup>21</sup>Dr. Thomas Abraham. 2012. *NRIs/PIOs – A Catalyst for Development*. GOPIO, Inc.

<sup>22</sup>*Ibid*

berisikan beberapa rekomendasi, antara lain diadakannya pertemuan diaspora India dari seluruh dunia oleh pemerintah India (*Pravasi Bharatiya Divas / PBD*), menyediakan kebijakan *dual nationality*, hingga mengupayakan menyediakan hak pilih untuk diaspora India dengan berbagai syarat dan ketentuan. Berbagai rekomendasi ini bertujuan untuk mendekatkan diaspora India pada tanah airnya, memudahkan mobilisasi diaspora India guna menunjang pembangunan negara, dan membuka ruang untuk partisipasi diaspora India pada pembangunan negara<sup>23</sup>.

Perdana Menteri Dr. Manmohan Singh pada tahun 2004 kemudian mendirikan kementerian baru untuk mengurus kepentingan diaspora India di dunia yaitu *Ministry of Non-Resident Indians' Affairs* yang kemudian berubah nama menjadi *Ministry of Overseas Indian Affairs* (MOIA) di bulan September 2004. Divisi emigrasi dari kementerian tenaga kerja kemudian dipindahkan ke MOIA dan divisi NRI dari kementerian luar negeri juga dipindahkan ke MOIA dengan nama divisi Diaspora. MOIA juga menangani segala aspek migrasi dan kepulangan migran ke India. Misi awal terbentuknya MOIA adalah:

*To establish a robust and vibrant institutional framework to facilitate and support mutually beneficial networks with and among Overseas Indians to maximize the development impact for India and enable Overseas Indians to invest in and benefit from the opportunities in India.*<sup>24</sup>

Poin utama dari misi ini adalah bagaimana MOIA dapat menjadi sebuah institusi yang dapat memfasilitasi dan mendukung jaringan yang bermanfaat secara mutual dengan diaspora India. Selain itu, MOIA juga harus memaksimalkan diaspora India untuk memberikan pengaruh bagi pembangunan India.

Ketika ikatan politik dan emosional dengan tempat asal menjadi begitu penting bagi komunitas diaspora di luar negeri, maka dapat ditelusuri berbagai aktivitas mereka dalam upaya untuk menghasilkan suatu perubahan kondisi di tanah asalnya menuju ke arah kebaikan secara sosial, ekonomi dan politik. Eva Ostergaard-Nielsen (2002) mengidentifikasi tiga peran yang sering dimainkan (namun tidak selalu) oleh komunitas diaspora<sup>25</sup>, dua diantaranya sesuai dengan diaspora India.

Peran pertama yaitu komunitas diaspora mencoba memberikan pengaruh langsung bagi berbagai peristiwa di tempat asal dengan cara memberikan

---

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>Ministry of Overseas Indian Affairs. *Strategic Plan*

<sup>25</sup>Antje Missbach. 2012. *Separatist Conflict in Indonesia: The long-distance politics of the Acehnese diaspora*. London: Routledge

bantuan politik dan ekonomi bagi pergerakan kelompok sejawat di negara asal (*homeland*). Sebagai contoh, Revolusi 1911 di Tiongkok tidak dapat dipisahkan dari dukungan finansial dari kaum perantauan (*overseas Chinese*) yang selalu mendanai gerakan sosial yang ada. Hal serupa juga terjadi dengan diaspora India. Sejak reformasi ekonomi India dimulai pada tahun 1991, terdapat banyak perubahan secara struktural yang terjadi di India yang kemudian mengizinkan adanya pertumbuhan ekonomi yang sehat. Diaspora India telah memainkan peranan yang cukup besar dalam investasi luar negeri namun kontribusinya terhadap perekonomian India sedikit terlambat disadari oleh pemerintah India.

Ketika India menghadapi krisis neraca pembayaran terburuknya di awal tahun 1990, nilai tukar valuta asing menurun drastis ketika waktu untuk melunasi utang luar negerinya sudah amat dekat. India kemudian mengambil pilihan untuk menggunakan cadangan nasional milik orang India dan hal itu merupakan deposit milik diaspora India yang membantu India untuk keluar dari krisis ini. Dalam sejarah negara India, kejadian ini merupakan permulaan peranan penting diaspora India dalam membangun perekonomian India.

Peran selanjutnya adalah dalam kasus tertentu kelompok diaspora dapat meminta perlindungan dari negara asal agar membebaskan mereka dari perilaku diskriminatif, perlakuan tidak adil, dan berbagai bentuk penindasan lainnya. Meskipun diaspora India merupakan salah satu faktor kuat dalam membangun hubungan antar negara, hal ini bertolakbelakang dengan apa yang terjadi dalam kasus India - Malaysia. Terjadinya marginalisasi yang terjadi di Malaysia terhadap diaspora India sendiri yang tidak lepas dari pembagian - pembagian berdasarkan etnis sejak tahun 1971 tidak membuat kelompok diaspora meminta perlindungan dari negara asalnya, India. Marginalisasi inilah yang kemudian menyebabkan diaspora India mengalami keterbelakangan dalam bidang sosial dan ekonomi sehingga memicu tingkat kekerasan yang dilakukan oleh diaspora India.

Pada tanggal 9 Maret 2003, sebuah insiden terjadi di Malaysia dimana sekitar 300 diaspora India yang sebagian besarnya merupakan kelompok profesional di bidang teknologi informasi diperlakukan dan diinterogasi dengan cara yang tidak berkenan oleh otoritas Malaysia. Pemerintah India pada saat itu kemudian mengambil tindakan memberikan peringatan bahwa apabila terjadi pengulangan terhadap insiden seperti ini akan mempengaruhi hubungan bilateral antara kedua negara ini. Pemerintah India menekankan akan memeriksa kembali segala perjanjian bilateral dan perdagangan dengan Malaysia. Tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah India adalah dengan menyatakan ketidakmampuannya untuk menerima menteri kesehatan Malaysia pada akhir bulan Maret 2003<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup>Amit Singh. 2014. Indian Diaspora as a factor in India-Malaysia relations. *Diaspora Studies*, Vol.

Selain itu di awal bulan Maret pada tahun yang sama, pada saat menerima menteri pembangunan kewirausahaan Malaysia, menteri – menteri India hanya membatasi pembicaraan seputar insiden perlakuan tidak menyenangkan tersebut. Agenda pembicaraan yang direncanakan oleh menteri dari Malaysia kemudian diabaikan pada pertemuan tersebut. Rangkaian respon dari pemerintah India ini kemudian diakhiri dengan penarikan tim nasional olahraga *hockey* India dari turnamen *hockey* yang cukup bergengsi yang diselenggarakan oleh Malaysia<sup>27</sup>. Untuk mengakhiri hal tersebut dan menyelesaikan persoalan antar kedua negara ini, Perdana Menteri Malaysia pada saat itu, Abdullah Ahmad Badawi kemudian mengeluarkan pernyataan permohonan maaf resmi dan meminta Menteri Luar Negeri Malaysia untuk melaporkan setiap waktu perkembangan dari kasus tersebut pada India.

Di tahun 2007, terdapat peningkatan kelompok radikal Islam yang mengabaikan hak – hak beragama bagi masyarakat non-Islam di Malaysia. Pemeluk agama Hindu yang sebagian besar terdiri dari diaspora India merasakan diskriminasi terbesar dari hal ini. Diskriminasi ini berujung dengan perobohan beberapa tempat ibadah agama Hindu oleh pemerintah Malaysia dengan alasan pembangunan dan pemaksaan umat Hindu untuk berpindah agama. Organisasi keagamaan Hindu, HINDRAF (*Hindu Rights Action Force*) mengadvokasi hal ini hingga ke dunia internasional. Advokasi ini juga membuktikan kurangnya peran diaspora India yang berada di dalam pemerintahan Malaysia sehingga membutuhkan organisasi keagamaan non-pemerintah untuk memperjuangkan hak – hak orang India khususnya yang beragama Hindu di Malaysia. Keseluruhan masalah ini kemudian berimbas pada pemilihan umum Malaysia pada tahun 2008, dimana suara Barisan Nasional tidak mencapai 2/3 dan kursi partai *Malaysian Indian Congress* (MIC) berkurang dari 9 menjadi 6.

Perihal masalah diskriminasi pada tahun 2007 ini, negara India sendiri tidak memberikan suatu tindakan nyata yang mendukung diaspora India yang berada di Malaysia. Dalam beberapa kesempatan pun, perdana menteri India hanya mengkritik cara negara Malaysia menangani permasalahan kultural di dalam negaranya. Perbedaan sangat mencolok dengan yang terjadi pada penanganan kasus diskriminasi pada tahun 2003.

Di sini penulis melihat bahwa terdapat perbedaan perlakuan oleh India terhadap kelompok diasporanya. Seperti yang sudah dipaparkan, pemerintah India membagi golongan kelompok diasporanya; NRI (*Non-Resident Indian*) yaitu penduduk India yang menetap di luar negeri karena urusan pekerjaan dan PIO (*Person of India Origin*) yaitu orang yang memiliki ayah atau kakek dengan warga

---

7 no. 2. New Delhi: Organization for Diaspora Initiatives. hlm. 136

<sup>27</sup>*Ibid*

negara India dan orang pernah memiliki paspor India selama mereka bukan warga negara Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, China, Iran, Nepal dan Bhutan. Karena masih merupakan warga negara India, maka NRI disini memiliki peran yang lebih daripada PIO, baik bagi India maupun bagi hubungan bilateral negara. Pemerintah India sendiri memiliki alasan bahwa PIO merupakan warga negara lain sehingga pemerintah India kurang menjangkaunya, namun hal ini merupakan pengingkaran dari tujuan India untuk memperhatikan seluruh diasporanya tanpa memandang kelompok tertentu.

Meskipun terdapat perbedaan perlakuan dari negara asalnya, kedua kelompok diaspora India ini tetap menunjukkan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral India dan Malaysia. Untuk melihat pengaruh ini, penulis melihat dari beberapa contoh kasus yang melibatkan negara India dan Malaysia secara bilateral dan di dalamnya berkaitan dengan diaspora India, baik itu secara positif dan negatif. Positif di sini adalah dimana pengaruh yang diberikan oleh diaspora India ini berdampak baik terhadap hubungan bilateral India dan Malaysia, misalnya menciptakan kerjasama tertentu. Pengaruh negatif yang dapat diberikan oleh diaspora India adalah dimana dapat mengancam hubungan kedua negara tersebut.

Memiliki jumlah diaspora India terbesar di wilayah Asia Tenggara, Malaysia kemudian menjadi negara utama yang dilirik oleh India sebagai rekan kerjasama. Keberadaan diaspora India yang besar di Malaysia ini dianggap dapat mempermudah komunikasi dan pengertian antara India dan Malaysia. Selain itu, India sendiri dengan kebijakan luar negeri "*Look East Policy*", lebih mengutamakan kesempatan bekerjasama lebih dengan negara - negara di bagian Timur dan dengan ini Malaysia kemudian menjadi negara pertama yang dijadikan rekanan. Latar belakang "*Look East Policy*" ini sendiri berawal dari keputusan penerimaan investasi asing oleh menteri keuangan India pada tahun 1991 dengan mencontoh Singapura yang tetap independen meski mendapat investasi asing yang tinggi. Meski mencontoh Singapura, namun pilihan utama untuk diajak bekerjasama dalam kebijakan ini adalah Malaysia.

Malaysia sendiri yang berada di antara dua kekuatan timur yang besar, yaitu India dan Tiongkok ternyata lebih mengutamakan India dalam memilih rekan kerjasamanya. Pilihan ini dipengaruhi oleh pandangan Malaysia terhadap Tiongkok mengenai ideologi komunisnya. Lebih dari itu, latar belakang historis yang sama kemudian menjadi salah satu alasan pilihan Malaysia terhadap India. Malaysia dan India juga memiliki kesamaan visi perihal arah kebijakan kerjasama luar negerinya, yaitu "*South - South*", dimana kerjasama ini mengutamakan rekan kerjasama di wilayah selatan. Alasan utama kerjasama wilayah selatan ini adalah untuk mengejar kemajuan ekonomi wilayah utara bersama - sama sehingga kekuatan yang dimiliki wilayah ini dapat semakin besar.

Di sini penulis melihat bahwa keberadaan diaspora India dapat secara tidak langsung mempengaruhi arah kerjasama negara India dan Malaysia. Diaspora India disini berdiri sebagai suatu kelompok entitas yang berada pada wilayah domestik Malaysia namun merupakan sumber daya manusia dari luar wilayah Malaysia. Pengaruh ini sebenarnya tidak terlalu memperlihatkan aktivitas nyata dari diaspora India seperti melakukan proses diskusi dengan pemerintah negara tertentu, tetapi hanya sekedar dengan membawa identitas kelompok etnis dengan jumlah yang besar.

Selain itu, diaspora India yang berada di Malaysia juga dapat mempengaruhi hubungan bilateral India dan Malaysia dikarenakan kedudukannya yang memegang jabatan penting di dalam pemerintahan Malaysia. Sejak awal kemerdekaan Malaysia sendiri, diaspora India sudah memiliki peran yang cukup signifikan dalam dunia politiknya. Namun dalam dekade terakhir ini, terjadi peningkatan jumlah menteri yang memiliki keturunan India. Hal ini tentu saja menjadi salah satu keuntungan, baik bagi diaspora India yang berada di Malaysia dan bagi negara India untuk urusan kerjasama sesuai bidang kerjanya.

Dalam perjanjian kerjasama ekonomi India - Malaysia yang ditandatangani pada tahun 2010 (*India - Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement*), terdapat beberapa poin yang cukup menguntungkan bagi India dan diaspora India di Malaysia. Implementasi dari *Financial Sector Masterplan*, yaitu memfasilitasi pembangunan dari pelayanan finansial di Malaysia kemudian menjadi gerbang untuk membuka cabang dari bank asal India di Malaysia. Selain itu, kebijakan *National Vision Policy* yang fokus terhadap pembangunan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan juga menerapkan kesetaraan dalam masyarakat Malaysia. Di bawah kebijakan ini, diaspora India juga dapat berkontribusi lebih terhadap pembangunan di Malaysia.<sup>28</sup>

Kerjasama bilateral antara India dan Malaysia sendiri hampir meliputi seluruh sektor kerja. Dengan adanya menteri di Malaysia yang merupakan diaspora India, prioritas kerjasama pada sektor - sektor tertentu akan lebih mengutamakan India sebagai rekan kerjasama. Untuk periode di bawah pemerintahan Mohd. Najib bin Abdul Razak, terdapat menteri diaspora India terbanyak sepanjang kemerdekaan Malaysia. Keberadaan jumlah yang banyak ini menjadi salah satu pemicu terciptanya program 1Malaysia yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Mohd. Najib bin Abdul Razak yang merupakan usaha dari pemerintah untuk menjaga kerukunan antar etnis. Di bawah program 1Malaysia

---

<sup>28</sup>Dr. Rupali Ahluwalia and Dr. Tarvinder Kaur. 2013. Indo-Malaysia Trade Relations - Commercial and Foreign Trade Policies Review. *International Monthly Refereed Journal of Research in Management & Technology Vol. III*. Hal. 79

ini juga terdapat program untuk memajukan wirausahawan India di Malaysia sehingga kesenjangan perekonomian dapat dieliminasi perlahan.

Amit Singh dalam tulisannya berpendapat bahwa diaspora India memiliki peranan sebagai sebuah katalis dalam hubungan bilateral India dan Malaysia<sup>29</sup>. Hal ini memiliki arti bahwa diaspora India mempunyai peranan untuk meningkatkan atau memperkuat hubungan bilateral tersebut. Selain itu, diaspora India meski tersebar di berbagai negara, namun tidak semuanya dapat disebut sebagai katalis bagi hubungan bilateral dua negara apabila memang diaspora India di suatu negara tidak memainkan perannya sebagai suatu aktor transnasional yang sebenarnya mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Diaspora India sendiri telah membuktikan hal tersebut dengan semakin meningkatnya jumlah kerjasama antara India dan Malaysia. Menambahkan hal tersebut, diaspora India dengan bantuan pemerintah India juga mampu mempengaruhi kebijakan dalam negeri Malaysia terkait persoalan izin kerja dan kewarganegaraan.

Meskipun berperan dalam meningkatkan hubungan bilateral, namun diaspora India juga berada dalam keadaan yang rapuh (*vulnerable*). Yang dimaksud di sini adalah diaspora India juga dapat berperan dalam merusak suatu hubungan bilateral, terkhusus hubungan bilateral India dan Malaysia. Hampir seluruh negara merdeka di dunia ini tentu akan mengutamakan keselamatan rakyatnya yang berada di luar wilayah negaranya. Sejalan dengan tersebut, hal ini tentu saja diterapkan dalam perlakuan pemerintah India terhadap diaspora India.

Kasus kekerasan terhadap diaspora India yang terjadi pada tahun 2003 di Malaysia sempat meregangkan kedua negara yang memiliki hubungan baik dengan latar belakang kesamaan historis ini. Penulis mengambil contoh kasus tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Indonesia dan Malaysia sendiri jelas merupakan dua negara tetangga, memiliki banyak kesamaan dan tentu saja kerjasama satu sama lain. Namun terdapat cukup banyak kasus penganiayaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia namun tidak ada tindakan yang cukup keras dari Indonesia terhadap Malaysia. Padahal jelas Indonesia tidak memiliki banyak hal yang patut ditakuti dari Malaysia, sama seperti India.

Dari berbagai contoh dan pengalaman diaspora di seluruh dunia, penulis kemudian mengelompokkan tingkat efektifitas diaspora dari berbagai negara dalam membangun hubungan bilateral antara negara asal dan negara tempat berdomisili. Tingkat efektifitas ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu, tingkat pendidikan migran yang kemudian menentukan penempatannya dalam tingkat sosial di negara tempat berdomisili. Latar belakang melakukan

---

<sup>29</sup>Amit Singh. 2014. Indian Diaspora as a factor in India-Malaysia relations. *Diaspora Studies*, Vol. 7, No. 2. New Delhi: Organization for Diaspora Initiatives. Hal. 138

migrasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas ini. Berikut penjelasan mengenai tingkat efektifitas diaspora di suatu negara:

### **1. Tingkat Efektifitas Rendah**

Pada tingkatan ini, kelompok diaspora dari suatu negara sangat jarang dan hampir tidak pernah melakukan atau memberikan kontribusi untuk hubungan bilateral antar negara. Tingkat efektifitas yang rendah ini juga dapat membuat identitas sebagai kelompok diaspora ini memudar. Hal ini disebabkan karena dengan tidak memberikan kontribusi pada hubungan bilateral dapat mengurangi kontak dengan negara asal. Kontak dan komunikasi dengan negara asal sendiri merupakan salah satu aspek penting bagi kelompok diaspora.

Penulis mengambil contoh diaspora Indonesia sebagai kelompok diaspora yang memiliki tingkat efektifitas yang rendah dalam mempengaruhi pembangunan hubungan bilateral. Meski telah diadakan konferensi diaspora pada tahun 2012, tetapi hal tersebut hanya merupakan langkah awal dari pembentukan komunitas diaspora yang efektif untuk sebuah negara. Sedangkan diaspora Indonesia sendiri telah lama tersebar di seluruh dunia dan jumlahnya tidak sedikit, tentu saja tindakan untuk melakukan pengikatan dari pemerintah Indonesia terhitung terlambat. Keterlambatan ini jelas menghambat pemanfaatan diaspora ini menjadi sumber daya yang strategis bagi negara asal dan negara tujuan.

### **2. Tingkat Efektifitas Menengah**

Tingkat efektifitas menengah menandakan adanya suatu pengaruh dari kelompok diaspora bagi negara asal dan negara tujuan. Pengaruh ini sendiri tidak terlalu sering dan dampaknya tidak terlalu besar baik bagi negara asal dan negara tujuan. Akan tetapi, seluruh persyaratan mengenai diaspora itu sendiri telah dipenuhi, seperti perihal ikatan komunikasi dan pengiriman *remittances*.

Untuk tingkat efektifitas menengah ini, penulis memilih diaspora India sebagai contohnya, dan secara spesifik yang berada di Malaysia. Sesuai dengan data yang telah dikumpulkan, diaspora India di Malaysia sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar untuk memiliki efektifitas yang tinggi dalam meningkatkan hubungan bilateral antara India dan Malaysia. Namun dengan adanya diskriminasi di awal kemerdekaan Malaysia terhadap etnis selain pribumi, hal ini kemudian menghambat peningkatan kualitas efektifitas ini.

Diskriminasi ini kemudian membuat hubungan bilateral antara India dan Malaysia menjadi dinamis. Dalam beberapa kasus, diaspora India menjadi salah satu penyebab hubungan antara kedua negara ini memburuk dan meningkat. Sementara diaspora India di negara lain dapat terus meningkat efektifitasnya sebagai suatu jembatan antara India dan negara tempatnya berdiam.

Untuk sekarang ini, Malaysia tidak lagi menerapkan diskriminasi yang berlebihan terhadap etnis selain pribumi. Hanya saja, hal yang telah turun temurun terjadi di Malaysia mengakibatkan keadaan diaspora India yang telah lama tinggal di Malaysia belum terbangun baik. Kedatangan diaspora India baru yang berasal dari kaum profesional dan keberadaan diaspora India di kursi pemerintahan Malaysia yang kemudian memberi sumbangsih besar terhadap hubungan bilateral antara India dan Malaysia.

### 3. Tingkat Efektifitas Tinggi

Kelompok diaspora dapat memiliki sumbangsih atau pengaruh terhadap penyusunan kebijakan bagi negara tempat tinggalnya terhadap negara asalnya. Hal ini merupakan tingkatan efektifitas tertinggi bagi kelompok diaspora. Pengaruh seperti ini dapat dilaksanakan khususnya bagi yang berada di masyarakat yang liberal demokratis dan tentu saja diaspora ini membentuk suatu kelompok kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri tempatnya berdiam terhadap negara asalnya.

Tingkat efektifitas diaspora yang tinggi ini praktiknya terdapat di Amerika Serikat, dimana terdapat banyak argumentasi bahwa terdapat berbagai macam lobi yang berasal dari kelompok etnis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kelompok etnis yang paling kuat sendiri merupakan kelompok diaspora asal Yahudi yang banyak terdapat di dalam kursi pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk praktik pluralisme dari Amerika Serikat atau sebagai penyeimbang dari elit politik tradisional di Amerika Serikat.

Selain itu, diaspora juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara asalnya. Diaspora yang memiliki kemampuan ekonomi dan politik dapat langsung mempengaruhi kebijakan luar negeri negara asalnya seperti menjadi sumber tenaga kerja, sumber pendanaan, atau dapat menjadi sumber senjata bagi aktifitas perang. Namun pengaruh seperti ini masih sangat jarang terjadi dan diteliti karena dilakukan secara tertutup.<sup>30</sup>

Melihat tingkat efektifitas ini, diaspora India yang masih berada di tingkat menengah sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efektifitasnya dalam mempengaruhi hubungan bilateral antara India dan Malaysia. Hal ini tidak lepas dari misi MOIA sendiri yaitu untuk menjadikan diaspora sebagai salah satu sumber daya yang strategis bagi India serta aktor bagi hubungan antara India dan negara – negara lain. Maka dari itu, untuk meningkatkan efektifitas ini, diperlukan pendekatan dan pengikatan (*engagement*) dari negara asal untuk terus mengingatkan betapa pentingnya

---

<sup>30</sup>Yossi Shain and Aharon Barth. 2003. Diasporas and International Relations Theory. *International Organization*, Vol. 57, No. 3 (Summer, 2003). Hlm. 454

diaspora ini bagi negara asalnya. Pendekatan ini diperlukan agar diaspora tidak memilih untuk menjadi warga negara lain, dalam hal ini Malaysia. Selain itu agar ikatan emosional yang menjadi dasar utama terbentuknya diaspora sendiri tidak hilang dimakan waktu.

Peningkatan efektifitas ini menjadi penting bagi diaspora India di Malaysia dikarenakan hal ini dapat meningkatkan kualitas hubungan bilateral antara India dan Malaysia. Sebagai contoh, keberadaan diaspora India tentunya harus dapat lebih memudahkan kesepakatan bisnis dan proses birokrasi yang ada di Malaysia. Selain itu, peningkatan efektifitas ini juga berguna agar diaspora India di Malaysia dapat melakukan lobi atau negosiasi demi meningkatkan kualitas hidup mereka di Malaysia.

Mengingat India sendiri sekarang ini merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, diaspora India sebenarnya dapat menggunakan hal ini sebagai sebuah *bargaining point* dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah Malaysia. Hal inilah yang tidak terjadi dikarenakan masih minimnya usaha dari MOIA untuk meningkatkan kesadaran diaspora India yang berada di Malaysia akan identitas asalnya. Selain itu, pernikahan antar etnis yang terjadi di Malaysia dan mewajibkan diaspora India untuk menjadi warganegara Malaysia juga menjadi salah satu penyebab lunturnya kecintaan diaspora India terhadap negara asalnya.

## **PENUTUP**

1. Hubungan bilateral India dan Malaysia sudah terjalin sejak berdirinya masing – masing negara. India dan Malaysia sendiri menjadi rekanan awal dan utama bagi masing – masing negara. Hubungan yang baik ini tidak lepas dari adanya diaspora India di Malaysia dalam jumlah besar dan telah ada sejak Malaysia belum merdeka. Diaspora ini sendiri tetap ada dan bertambah hingga saat ini. Terdapat pembagian golongan bagi diaspora India, yaitu NRI (*Non-Resident Indian*) dan PIO (*People of Indian Origin*). Pembagian golongan ini sendiri mempengaruhi peranan diaspora India bagi hubungan bilateral India dan Malaysia, dimana NRI yang masih memegang paspor India dan merupakan kelompok yang profesional lebih dapat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara.
2. Keberadaan diaspora India dapat secara tidak langsung mempengaruhi arah kerjasama negara India dan Malaysia. Diaspora India disini berdiri sebagai suatu kelompok entitas yang berada pada wilayah domestik Malaysia namun merupakan sumber daya manusia dari luar wilayah Malaysia. Pengaruh ini sebenarnya tidak terlalu memperlihatkan aktivitas nyata dari diaspora India seperti melakukan proses diskusi dengan

pemerintah negara tertentu, tetapi hanya sekedar dengan membawa identitas kelompok etnis dengan jumlah yang besar.

3. Meskipun berperan dalam meningkatkan hubungan bilateral, namun diaspora India juga berada dalam keadaan yang rapuh (*vulnerable*). Yang dimaksud di sini adalah diaspora India juga dapat berperan dalam merusak suatu hubungan bilateral, terkhusus hubungan bilateral India dan Malaysia. Kasus kekerasan terhadap diaspora India yang terjadi pada tahun 2003 di Malaysia sempat meregangkan kedua negara yang memiliki hubungan baik dengan latar belakang kesamaan historis ini.
4. Efektifitas diaspora India terhadap hubungan bilateral India dan Malaysia sendiri tergolong menengah. Diaspora India di Malaysia memiliki kapasitas yang cukup untuk mempengaruhi hubungan bilateral yang ada, namun karena berbagai regulasi di Malaysia yang diskriminatif membuat perkembangan dari diaspora India di Malaysia itu sendiri menjadi terhambat sehingga menempatkan diaspora India sebagai kaum rendahan di Malaysia.
5. Faktor yang mempengaruhi efektifitas ini antara lain, kurangnya pendekatan dan pengikatan dari India, yang dalam hal ini ditujukan kepada *Ministry of Overseas Indian Affairs* (MOIA) terhadap diaspora India yang berada di Malaysia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Brown, Judith. M. 2006. *Global South Asians: Introducing the Modern Diaspora*. New York: Cambridge University Press
- Faist, T., & BAUBÖCK, R. 2010. *Diaspora and Transnationalism. Concepts, Theories and Methods*. Amsterdam: Amsterdam University Press
- Harutyunyan, Anna. 2012. "*Challenging the Theory of Diaspora from the Field*". Humboldt; Universitat zu Berlin
- Kenny. 2013. *Diaspora: A Very Short Introduction*. Oxford University Press
- Kumar, Naresh. 2012. *Recent Trend and Pattern of Indian Emigration to Gulf Countries: A Diaspora Perspective*. India: Centre for Diaspora Studies. Central University of Gujarat
- Missbach, Antje. 2012. *Separatist Conflict in Indonesia: The long-distance politics of the Acehnese diaspora*. London: Routledge
- Parmer, N.J. 1960. *Colonial Labor Policy and Administration: A History of Labor in the Rubber Plantation Industry in Malaya 1910–1941*. New York: J.J. Augustin Inc.
- Raghuram, Parvati (et al.). 2008. *Tracing an Indian Diaspora, Contexts, Memories,*

*Representations*. New Delhi: SAGE Publications

Santoso, Moch. Iman. 2014. *Diaspora: Globalisme, Keamanan, dan Keimigrasian*. Bandung; Pustaka Reka Cipta

T. May Rudy. 2002. *Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama

#### **DOKUMEN, JURNAL, MAKALAH, DAN ARTIKEL**

Abraham, Thomas. 2012. *NRIs/PIOs – A Catalyst for Development*. GOPIO, Inc.

Ahluwalia, Rupali & Tarvinder Kaur. 2013. Indo-Malaysia Trade Relations – Commercial and Foreign Trade Policies Review. *International Monthly Refereed Journal of Research in Management & Technology Vol. III*.

Balakrishnan, K. S. 2001. *Malaysia – India Relations: Trends in Security and Economic Cooperation Within the Developing World*. Journal of Diplomacy and Foreign Relations Volume 3, Number 1

Bhaskar, T. L. S. 2011. *Telugu diaspora in the United States*. Santa Cruz: University of California

EEA and Norway Grants 2009 – 2014: Guideline for Strengthened Bilateral Relations

Gamlen, Cummings, Vaaler, and Rossouw. 2013. “*Explaining the Rise of Diaspora Institutions*”. Working Paper 78, November 2013. Oxford Diasporas Programme

Garrett, Natasha. 2011. *Transnationalism, Home, and Identity: Personal Essays*. University of Pittsburgh

Gopal, Parthiban S. Premalatha Karupiah. 2013. *Indian Diaspora and Urban Poverty: A Malaysian Perspective*. Diaspora Studies, Volume 6, Issue 2

Helmreich, Stefan. 1992. “*Kinship, Nation, and Paul Gilroy’s Concept of Diaspora*”, *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, Vol.2, No. 2

Kim Hui Lim. 2008. “Political Volcano” in 12<sup>th</sup> Malaysian General Election: *Makkal Sakhti* (People Power) Against Communal Politics, “3Cs” and Marginalization of Malaysian Indian. *Journal of Politics and Law* Vol. 1 No. 3 (2008)

Maher, Garret. 2012. *Defining Transnationalism: Geographical Perspective*.

Presentation. Department of Geography, National University of Ireland, Galway

Menon, Jayant. 2008. *Macroeconomic Management Amid Ethnic Diversity: Fifty Years of Malaysian Experience*. ADB Institute Discussion Paper No. 102

Ministry of Overseas Indian Affairs. *Strategic Plan*. 2012

Safran, W. 1991. Diasporas in modern societies: myths of homeland and return. *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, 1(1)

Shain, Yossi and Aharon Barth. 2003. Diasporas and International Relations Theory. *International Organization*, Vol. 57, No. 3 (Summer, 2003)

Singh, Amit. 2011. *India – Malaysia Strategic Relations*. Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India. Volume 7, Number 1

Singh, Amit. 2014. *Indian Diaspora as a factor in India – Malaysia Relations*. Diaspora Studies. Volume 7, Number 2. New Delhi: Organization for Diaspora Initiatives

## WEBSITE

Drabble, John H.. "Economic History of Malaysia". diakses dari <http://eh.net/encyclopedia/economic-history-of-malaysia/> diakses pada tanggal 9 Maret 2015

Jomo, K. S. 2011. "Whither Malaysia's New Economic Policy?". Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2759912> diakses pada tanggal 13 Maret 2015

Rao, Ashok. "The Indian Diaspora – Past, Present and Future," diakses dari <https://www.tie.org/article/indian-diaspora-past-present-and-future-ashok-rao> diakses pada 15 September 2014

Singh, Karmveer. "Challenges to the Rights of Malaysians of Indian Descent". <http://www.e-ir.info/2013/02/06/challenges-to-the-rights-of-malaysians-of-indian-descent/>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2015

\_\_\_\_. "History of Malaysian Indian Congress," diakses dari <http://www.mic.org.my/history> - diakses pada tanggal 5 November 2014

\_\_\_\_. "Overview of Citizenship Act, 1955 and Amendments Made There Under," diakses dari [http://indembassyuae.org/ConsulServ\\_indCiti.html](http://indembassyuae.org/ConsulServ_indCiti.html) diakses pada tanggal 15 Oktober 2014

\_\_\_\_. "Ministry of Overseas Indian Affairs. About Us – An Overview," diakses dari <http://moia.gov.in/services.aspx?mainid=6> diakses pada tanggal 15

Oktober 2014

- \_\_\_\_. *"Trans-nationalism | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization"* diakses dari <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/trans-nationalism/> diakses pada 27 Februari 2015
- \_\_\_\_. *"New Economic Policy"* Official Website of Economic Planning Unit Prime Minister's Department Malaysia. diakses dari <http://www.epu.gov.my/en/dasar-ekonomi-baru> diakses pada tanggal 16 Maret 2015

### **KORESPONDENSI**

Sarjit S. Gill, *Social Anthropoligst, Dept. Of Social Development Sciences, Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia* (wawancara, Makassar, 23 Februari 2015)